

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Tabel 1.1
Tren Aktor Korupsi 2013 s/d 2016

Aktor Korupsi	2013	2014	2015	2016
DPR/DPRD	28	15	13	39
Pemda/Pemkot/Pemkab	246	171	211	217
Swasta	79	94	317	150
Kampus	19	17	18	17
Kepala Daerah	20	8	19	32
BPN/Bappeda/BPK	21	8	6	6
KPU		0	0	10
Perbankan	13	10	6	12
Kementerian	6	11	2	8
Advokat/Auditor		2	0	2
RS	5	5	3	9
Polisi/Jaksa/Hakim	3	1	3	4
Lain-lain	25	2	14	34
BUMN/BUMD	15	38	63	26
Tdf	18	61	43	98

Sumber: www.antikorupsi.org

Berdasarkan tabel 1.1, sebagaimana merupakan alasan penulis mengambil pemerintah daerah di Indonesia sebagai objek penelitian, *Indonesia Corruption Watch* memaparkan korupsi dari segi aktor atau pelaku tindak pidana korupsi. Aktor yang paling mendominasi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi dengan jumlah 246 orang ditahun 2013, 171 orang ditahun 2014, 211 orang ditahun 2015, dan 217 orang ditahun 2016. Diurutan kedua diisi oleh kalangan swasta dengan 79 orang ditahun 2013, 94 orang ditahun 2014, 317 orang ditahun 2015, dan 150 orang terdakwa ditahun 2016. Korupsi yang dilakukan oleh kalangan swasta berupa gratifikasi. Gratifikasi berupa pemberian pada pejabat-pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan dan diberikan karena apa yang dikendalikan, dikuasai oleh penerima yaitu berupa wewenang yang melekat pada jabatan yang bersangkutan. Gratifikasi termasuk tindak pidana korupsi. Meski begitu jumlah tersebut bukan angka final, setidaknya masih ada 98 terdakwa yang tidak diketahui profesi dan latar belakangnya lantaran putusannya tidak lengkap dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut (www.anti.korupsi.org).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Fenomena korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Hal ini menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Korupsi terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang. Otonomi daerah membawa implikasi pada terjadinya pergeseran kekuasaan pusat ke daerah dan antar lembaga di daerah. Namun, sejak diberlakukannya otonomi daerah, telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintah daerah yang meningkat (Khairudin dan Rina, 2016:137).

Transparency International (TI) mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) peringkat negara yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi di sektor publik. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari *Transparency International* (TI) ini memiliki rentang 0-100 atau sebagaimana 100 mengindikasikan bebas korupsi dan 0 berarti banyak terjadi korupsi di suatu negara. Berikut indeks persepsi korupsi beberapa Negara di Asia Tenggara :

Tabel 1.2
Indeks Persepsi Korupsi
Beberapa Negara di Asia Tenggara

Negara (Tahun)	Peringkat				Skor			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Singapore	5	5	7	8	87	86	84	85
Malaysia	54	53	50	54	49	50	52	50
Thailand	88	102	85	76	37	35	38	38
Indonesia	118	114	107	88	32	32	34	36
Philippines	108	80	85	95	34	36	38	35

Sumber : *Transparency International* Indonesia (TII)

Dari data yang diperoleh diatas, pada tahun 2013, indeks persepsi korupsi Indonesia menempati posisi urutan 114 dari 175 negara yang diukur dengan skor sebesar 32. Skor tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan atau konstan dari tahun sebelumnya. Skor tersebut didapat dari persepsi masyarakat terhadap risiko korupsi di Indonesia. Semakin tinggi skor maka semakin bersih pula negara tersebut dari korupsi (www.ti.or.id).

Otonomi daerah pada dasarnya diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance*. Salah satu karakteristik *good governance*, yaitu akuntabilitas dan transparansi (Mardiasmo dalam Khairudin dan Rina, 2016:138). Akuntabilitas diartikan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Sedangkan, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Tahir, 2012).

Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pengelolaan yang transparansi dan akuntabel yang dilakukan pemerintah daerah selama ini. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan pemerintah daerah kepada masyarakat harus jelas. Informasi tersebut berupa informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang digunakan untuk menilai transparansi dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Transparansi informasi dapat dilakukan pemerintah daerah melalui media elektronik yaitu situs resmi (e-government). Perintah untuk pengungkapan informasi pemerintahan pada situs resmi diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mewajibkan pelaporan informasi keuangan daerah secara berkala melalui dokumen tertulis dan situs resmi pemerintah daerah dengan tujuan untuk melakukan publikasi kepada pengguna informasi. Keterbukaan informasi adalah hak dari pengguna informasi, seperti masyarakat, investor, maupun pemerintah itu sendiri dan penggunaan situs resmi dinilai efektif serta efisien bagi pemerintah, masyarakat maupun investor untuk memperoleh informasi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SC/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dimana pemerintah daerah harus menyiapkan menu konten dan melakukan publikasi data mutakhir dalam menu konten tersebut pada situs resminya. Transparansi dan kepercayaan layanan informasi publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan.

Menurut Mardiasmo dalam Khairudin dan Rina (2016:140), laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi hal penting karena

merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Hasil pemeriksaan keuangan BPK atas LKPD disajikan dalam tiga kategori yaitu opini audit, sistem pengendalian internal (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (BPK 2009 dalam Setiawan, 2013:29). Dari penjelasan yang telah diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik. Berikut perkembangan opini LKPD di Indonesia tahun 2012 sampai 2013:

Tabel 1.3
Perkembangan Opini LKPD di Indonesia

LKPD	Opini								Total
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2012	120	2,95	319	60,99	6	1,15	78	14,91	523
Tahun 2013	156	29,77	311	59,35	11	2,1	46	8,78	524

Sumber : IHPS Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia

Sebagai negara yang mengalami penurunan peringkat indeks persepsi korupsi (dapat dilihat pada tabel 1.2) tiap tahun dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebesar 156 pemerintah daerah atau 29,77% atau lebih banyak dari tahun 2012 (dapat dilihat pada tabel 1.3), ternyata *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2013 di Indonesia terjadi 560 kasus korupsi dan sebanyak 1.271 orang tersangka yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 7,3 triliun rupiah. Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 159 kasus dibandingkan selama tahun

2012, yaitu sebesar 401 kasus korupsi dan skor indeks persepsi korupsi Indonesia konstan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 32.

Dalam penelitian Heriningsih dan Marita (2013) menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dilakukan audit atas LKPD oleh pihak independent (BPK RI). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat berupa opini auditor, dimana terdapat empat jenis pendapat auditor (BPK). Apabila opini auditor unqualified opinion maka menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah semakin bagus dan diharapkan akan mengurangi terjadinya korupsi. Sedangkan jika opini qualified opinion, adverse opinion, dan disclaimer opinion, maka masih ada kemungkinan terjadi salah saji material sehingga mengindikasikan bisa terjadi korupsi.

Lain hal dengan hasil penelitian BPKP bahwa tidak ada hubungan langsung antara opini BPK atas laporan keuangan pemerintah dengan kasus tindak pidana korupsi. Semakin baik opini BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (dalam hal ini provinsi) tidak menyebabkan menurunnya kasus tindak pidana korupsi di kementerian/ lembaga maupun pemerintah provinsi. BPK memberikan opini WTP jika tidak ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern instansi pemerintah yang diaudit. Meskipun tujuan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK tidak ditujukan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan (fraud), namun sudah selayaknya jika terjadi kecurangan yang material, prosedur audit yang dijalankan harus dapat mendeteksi kecurangan tersebut. Kegagalan BPK mendeteksi terjadinya kasus korupsi pada instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai kegagalan BPK mengelola risiko deteksi. Semakin mampu BPK mengelola risiko deteksi maka semakin tinggi jaminan bahwa opini WTP oleh BPK menjamin tidak terjadinya tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil kemampuan BPK mengelola risiko deteksi maka semakin besar kemungkinan

tidak ada kaitannya antara opini yang diberikan dengan terjadinya kasus tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah yang diaudit (www.bpkp.go.id).

Penelitian BPKP ini dibuktikan dengan fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada lebih dari tiga pemerintah daerah yang terdapat kasus korupsi meski daerahnya mendapat WTP. Berikut pemerintah daerah yang terdapat kasus korupsi meskipun pernah mendapat opini WTP dari BPK :

1. Riau

Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mendapat opini WTP dari BPK selama 4 tahun berturut-turut. Tercatat, Pemprov Riau mendapat opini WTP sejak tahun 2012. Meski empat kali mendapat opini WTP, kepala daerah Riau justru paling sering berurusan dengan KPK. Tiga kali berturut-turut Gubernur Riau menjadi tersangka kasus korupsi di KPK.

Rusli Zainal yang menjabat sebagai Gubernur Riau selama dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Rusli juga jadi tersangka KPK dikasus korupsi pembangunan venue PON dan suap terhadap anggota DPRD. Terakhir, Annas Maamun yang menjabat sebagai Gubernur Riau periode 2013-2018. Annas Maamun di tangkap saat menerima suap terkait pengurusan perizinan alih fungsi lahan hutan. Dia juga terjerat kasus korupsi pembahasan APBD Riau.

2. Palembang

Sudah lima kali Pemkot Palembang diganjar WTP oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terakhir, Pemkot Palembang mendapat WTP pada tahun 2014. Meski lima kali WTP, tak menjamin Pemkot Palembang bebas dari korupsi. Buktinya, sang walikota, Romi Hertton harus berurusan dengan KPK atas kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK. Bahkan, Romi Hertton yang bersekongkol dengan istrinya itu kini sudah dijatuhi vonis atas kasus suap terhadap Akil Mochtar.

3. Bangkalan

Salah satu kabupaten di pulau Madura, Bangkalan menjadi salah satu kabupaten yang rajin mendapat opini WTP dari BPK. Tercatat, setidaknya Pemkab Bangkalan mendapat empat kali WTP dari tahun 2010-2013. Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan periode 2003-2013 tak hanya berurusan di KPK karena kasus suap. Bupati dua periode itu juga dijerat karena telah melakukan korupsi dan mencuci uang hasil kejahatannya. Kini pemerintahan Bangkalan dipegang putra Fuad Amin.

4. Tegal

Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2012 mendapat ganjaran opini WTP dari BPK karena laporan keuangannya dinilai memuaskan. Namun, Walikota saat itu, Ikmal Jaya harus berurusan dengan KPK. Ikmal Jaya menjadi tersangka di KPK atas kasus korupsi tukar guling tanah aset pemerintah dengan milik swasta. Atas perbuatan Ikmla Jaya, Negara dirugikan miliaran rupiah.

Sumber : news.detik.com (2015)

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa opini audit yang diberikan BPK belum menjamin suatu entitas tidak melakukan tidak pidana korupsi. Serupa dengan hasil penelitian Khan (2006) dalam Masyitoh et al. (2015) bahwa Auditor hanya berperan dalam membantu menunjukkan wilayah dimana kemungkinan tindakan korupsi dapat terjadi dan dalam penelitian Heriningsih (2015) bahwa walaupun opini audit atas LKPD memperoleh WTP dari BPK RI, namun masih sangat memungkinkan adanya bahaya korupsi yang bisa terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merujuk pada penelitian Khairudin dan Rina (2016) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan menurut penelitian Sucahyo Heriningsih (2014), akuntabilitas (yang diukur dari opini audit, tingkat kelemahan sistem pengendalian internal, tingkat ketaatan terhadap perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, serta menurut Aminah dan Tarmizi (2013), transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD). Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang telah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang Disurvei oleh KPK di Tahun 2013)”**

1.3 Perumusan Masalah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hasil dalam upaya pengawasan dalam menilai tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah. Transparansi suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari adanya situs resmi suatu pemerintah daerah secara terbuka bagi masyarakat, investor dan pemerintah. Sedangkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari pemberian opini yang dilakukan oleh BPK, dilakukan dengan melihat kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi dan kewajaran, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang efektif. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat mengurangi peluang-peluang pemerintah daerah melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus masih terdapat pemerintah daerah yang sudah memiliki website resmi dan mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tetapi terbukti telah melakukan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengujian kembali mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi ?
 - a. Bagaimana pengaruh transparansi secara parsial terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?
 - b. Bagaimana pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan munculnya masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi
 - a. Untuk mengetahui pengaruh transparansi secara parsial terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan tidak hanya bagi peneliti sendiri tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia serta sebagai bahan kajian atau referensi dalam penelitian di masa yang akan

datang mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan daerah dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang serta pemerintah daerah di Indonesia mulai reaktif terhadap pemberantasan korupsi sehingga dapat lebih meningkatkan pertanggungjawaban terhadap rakyat.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (variabel independen) dan satu variabel terikat (variabel dependen). Transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependennya adalah tingkat korupsi.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah pemerintah daerah atau kabupaten dan kota di Indonesia. Objek penelitian yang digunakan adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah atau kabupaten dan kota di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran tentang tempat penelitian yang digunakan. Kemudian latar belakang penelitian yang berisi tentang fenomena atau gejala dari peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian yang membahas teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, masalah, atau variabel penelitian, difokuskan pada teori-teori yang sudah baku dan teruji secara ilmiah. Kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pemikiran yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya masih harus diuji secara empiris serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab dan menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasannya harus diuraikan secara kronologis dan sistimatis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Sistematika pembahasan ini akan lebih tampak jelas luas cakupan, batasan, dan benang merahnya apabila disajikan dalam sub judul tersendiri. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi ulasan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisa bab IV, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)